

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori dan Penurunan Hipotesa

1. Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan yang minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2019). Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan abosolut ini biasanya identik dengan pemenuhan kebutuhan seseorang. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskian relatif ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pengaruh dari kebijakan pembangunan

yang belum merata dan belum dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut Robert Chambers (2010) dalam Dama dkk (2016) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu :

- 1) Kemiskinan (*proper*)
- 2) Ketidakberdayaan (*powerless*)
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- 4) Ketergantungan (*dependence*) dan
- 5) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi bagi para pembuat kebijakan. Keluarga miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi.

Ciri-ciri kelompok miskin :

- 1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan
- 2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah

- 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setelah menganggur (tidak bekerja)
- 4) Kebanyakan berada di daerah pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area)
- 5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakainan, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya. (Suryawati, 2005 dalam Dama dkk, 2016).

Menurut Spicker dalam Agustina dkk (2018) ada beberapa penyebab kemiskinan yang dibagi menjadi 4 Mahzab, pertama adalah *Individual Explanation* yaitu kemiskinan yang terjadi akibat orang miskin itu sendiri, penyebabnya antara lain malas, kekurangan atau kecacatan, miskin karena salah dalam membuat keputusan atau pilihan, mempunyai anak pada waktu yang kurang tepat, gagal untuk bekerja dan sebagainya. Kedua adalah *Familial Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan sehingga akan terjadi ketidakberuntungan pada generasi selanjutnya. Ketidakberuntungan ini dapat berupa asuhan dan pendidikan. Ketiga adalah *Subcultural Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pola perilaku, tetapi lebih disebabkan karena keadaan pada pilihan personal. Keempat adalah *Structural Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial hasil dari masyarakat di tempat tersebut, seperti adanya kesenjangan sosial, kelas, status atau kekuatan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan,

pendidikan, atau kesehatan. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar dan sulitnya akses pendidikan serta pekerjaan dapat menyebabkan kemiskinan. Selain itu, masalah umum yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi pada masyarakat serta gambaran tentang kurangnya penghasilan yang memadai.

Banyak yang menyatakan bahwa terjadinya kemiskinan relatif berdasarkan pendapatan yang rendah serta memiliki keterkaitan dengan kesehatan yang buruk. Namun, pendekatan pendapatan relatif mempunyai beberapa keterbatasan untuk menjelaskan aspek kemiskinan yang beragam dan kompleks. Terdapat beberapa tantangan dalam konsep kemiskinan, seperti meningkatnya beban kerja klinis, kompensasi keuangan untuk kebutuhan tambahan yang tidak wajar, dan investasi dalam pelayanan masyarakat untuk kebutuhan mereka. Meskipun terdapat beberapa tantangan, kesenjangan yang tidak teratasi akan menyebabkan hasil yang lebih buruk dan meningkatnya biaya dalam jangka panjang. Indeks kemiskinan ditentukan oleh pendapatan sebelum pajak dan disesuaikan dengan perubahan biaya hidup secara keseluruhan setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam indeks harga konsumen.

Kemiskinan berifat multidimensi yang mempunyai arti bahwa kebutuhan manusia beragam maka kemiskinan juga mempunyai banyak aspek, seperti aspek primer adalah miskin akan modal, organisasi sosial,

politik, pengetahuan dan keterampilan dan aspek sekunder adalah miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Aspek-aspek kemiskinan tersebut dapat dilihat dalam bentuk kekurangan gizi, rumah yang tidak layak, kesehatan yang kurang baik dan pendidikan rendah. Semua aspek kemiskinan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga apabila ada kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek maka akan mempengaruhi aspek lainnya (Arsyad, 2004: 104 dalam Agustina dkk, 2018).

Banyak yang mengira bahwa kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dua hal yang sama. Namun kenyataannya ada perbedaan antara kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaan ini perlu di tegaskan. Kemiskinan sangat berkaitan dengan standar hidup yang absolut, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan mengacu pada standar hidup relatif dari keseluruhan masyarakat. Selain itu, kemiskinan sering dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi. artinya, ada keterkaitan antara berbagai macam kebutuhan manusia dengan kemiskinan.

Suryawati (dalam Aziz dkk, 2016) menyatakan bahwa hidup dalam kemiskinan tidak hanya hidup dalam kekurangan materi serta tingkat penghasilan yang rendah, melainkan mencakup banyak hal, seperti kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, rentan terhadap ancaman kriminal, serta ketidakmampuan dalam

menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Daerah-daerah seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif dan relatif bergantung pada pihak lain.
- d. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini terjadi karena akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial budaya dan sosial politik rendah dan akan menyebabkan kemiskinan meningkat dengan pesat.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, adapula kemiskinan yang berdasarkan sifat. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kurangnya sumber daya alam dan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), serta keadaan tanah yang tandus (kurang subur). Wilayah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah wilayah yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak disebabkan karena sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang terjadi dari dampak negatif pelaksanaan pembangunan (*developmentalism*) yang biasanya dilakukan oleh negara sedang berkembang. Hal ini terjadi karena sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan tidak meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan di sektor industri seperti lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan ini seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang telah dilaksanakan sejak lama oleh negara sedang berkembang pada periode 1970an dan 1980 (Jarnasy dalam Jacob, 2018).

Menurut Kartasmita (1996) dalam (Usman dan Diramita, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklarifikasikan menjadi empat berdasarkan pola waktu, meliputi :

- a) Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang terjadi dari turun-menurun.
- b) Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang didasari dari keadaan ekonomi secara keseluruhan.
- c) Seasonal poverty, yaitu kemiskinan yang bersifat musiman biasanya dijumpai pada penduduk yang berprofesi nelayan dan petani.
- d) Accident poverty, yaitu kemiskinan yang disebabkan adanya bencana alam, kekerasan dan konflik.

Terdapat dua faktor utama untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara, pertama adalah tingkat pendapatan rata-rata dan yang kedua adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Apabila tingkat pendapatan rata-rata suatu daerah tinggi tetapi distribusi pendapatan pada daerah tersebut belum merata maka tingkat kemiskinan akan terus bertambah. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat distribusi pendapatan suatu daerah sudah merata tetapi pendapatan rata-rata daerah tersebut rendah maka kemiskinan akan bertambah besar (Todaro dan Smith dalam Ramdani, 2015)

Kemiskinan berhubungan erat dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara finansial dan sosial serta membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari mereka yang mampu. Pernyataan ini juga menegaskan fakta bahwa

kemiskinan mengacu pada mereka yang mengalami kurang relatif (Igbari, 2016).

Dekker (2004) dan Leliveld (2006) dalam Khemili dan Belloumi (2015) menyatakan bahwa penyakit adalah resiko yang sering dihadapi oleh masyarakat di negara berkembang. Penyakit kemungkinan akan mengurangi pendapatan apabila mereka tidak bekerja dan tidak bisa membayar biaya perawatan. Mereka seringkali membayar biaya perawatan dengan menjual aset produktif mereka seperti tanah dan ternak. Strategi semacam itu dapat meningkatkan resiko terjebak dalam kemiskinan. kemiskinan adalah subjek topikal dan karenanya harus menjadi fokus utama program sosial dan pengembangan di masa depan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi yang mampu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti menyediakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara paling berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan (Schell-Adlung et al. 2006 dalam Khemili dan Belloumi, 2015).

Dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama secara mikro. Dilihat dari aspek mikro ekonomi kemiskinan muncul karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki sehingga akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya penduduk miskin hanya mempunyai sedikit sumber daya alam dengan kualitas yang rendah. Kedua kemiskinan muncul karena adanya perbedaan sumberdaya manusia. Apabila kualitas sumberdaya manusia rendah itu

berarti produktivitas yang mereka hasilkan untuk menciptakan barang dan jasa juga rendah yang kemudian akan berdampak pada upah yang rendah pula. Ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam akses modal (Waluyo, 2013 dalam Azizah dkk, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan membangun dan meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi orang-orang miskin (Titaley, 2015).

2. Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat. Kemiskinan telah menyebar di seluruh negara, tidak terkecuali negara muslim, kemiskinan bukan hal yang aneh bahkan telah menyebar di berbagai negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim. Padahal, Islam sangat menjauhi kemiskinan, dan menyarankan setiap muslim agar menjadi kaya dan tidak bergantung dengan orang lain.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* yang menyarankan agar setiap muslim mampu bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pada saat seseorang bekerja, hal tersebut merupakan salah satu ibadah yang telah dijalankannya untuk bekal menuju kehidupan sebenarnya yaitu akhirat (Setiawan dan Hasanah, 2016).

a. Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Kemiskinan

1) Matan Hadits

a) Hadits Riwayat Ibnu Majah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد ابن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدرى قال أحبوا المساكين فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرنى في زمرة المساكين

Abu Bakar bin Abi syaibah dan Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Sinan dari api al-mubarak dari 'atha' dari api sa'id al-khudry, ia berkata, "Cintailah orang miskin, saya mendengar nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang miskin. (HR. Ibn Majah)

b) Hadits Riwayat Abu Daud

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, menceritakan kepada kami Hammad, mengabarkan kepada kami Ishaq, dari Abdillah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW berdoa: "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kekafiran, kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi. (HR. Al-Nasa'i)

Terdapat perbedaan pandangan antara dua hadits tersebut diatas. Hadits pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT supaya beliau dijadikan orang miskin, mati dalam keadaan miskin, dan berkumpul bersama dengan orang-orang miskin. Sedangkan hadits kedua menyatakan bahwa Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kefakiran, kekurangan, dan dari kedzaliman.

3. Islam, Kemiskinan dan Solusinya

Didalam al-Qur'an kata miskin selalu disandingkan bersamaan dengan kata fakir. Dua kata ini merupakan awal mula konsep kemiskinan dalam al-Qur'an. Sebanyak 25 kali kata miskin disebutkan dalam al-Qur'an dan sebanyak 13 kali kata fakir disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satu surat yang menjelaskan tentang kemiskinan adalah QS. Al-Fathir [35] : 9

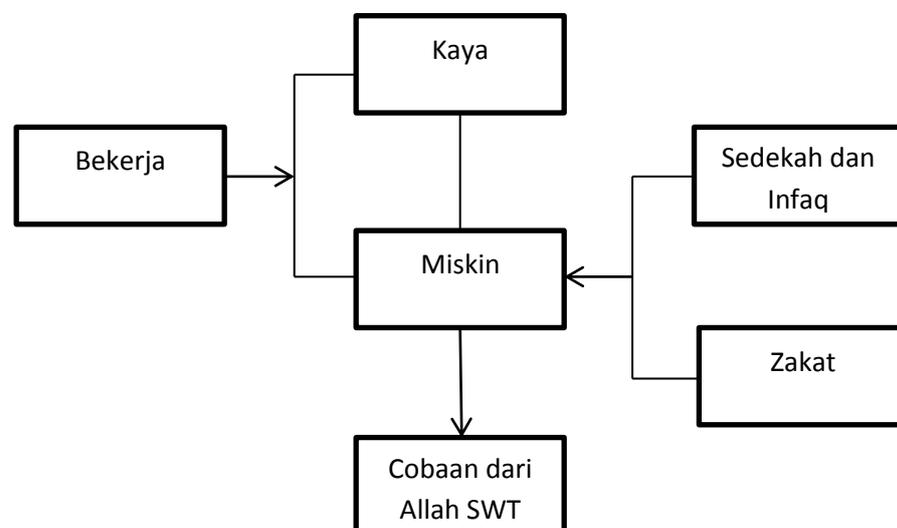
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثَوِّبُهَا فَيَسُقِ السُّحُبَ مِنْهَا إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَآحْيِيهَا تَأْتِي بِهَا مِنَ السَّمَاءِ مَوْتًا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُنشَوُّونَ

Kemiskinan dalam al-Qur'an adalah cobaan yang selalui dikaitkan dengan ketakutan akan kekurangan harta, jiwa dan makanan. Tetapi,

merupakan hal yang penting bagi seorang miskin apabila dia bisa sabar dan selalu beriman kepada Allah SWT, serta percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kepada-Nya lah segala sesuatu akan kembali. Kemiskinan adalah *sunnatullah* yang tidak akan hilang dan selalu ada dimuka bumi. Bahkan kedudukan manusia sebagai hamba Allah adalah refleksi dari kemiskinan manusia kepada Allah SWT (QS. Fathir [35] : 9).

Tetapi, walaupun kemiskinan adalah *sunnatullah*, seorang muslim senantiasa diwajibkan untuk bisa memperoleh rezeki yang lebih agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sehingga kefakiran dan kemiskinan dapat dihindari. Sebagaimana doa Rasulullah SAW selalu berdoa agar terhindar dari kemiskinan kedzaliman, dan kelemahan {HR. Abu Daud an-Nasa'i).

Dalam Islam, ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu dengan bekerja, dengan sadaqah dan infaq serta zakat. Berikut merupakan gambaran daripada solusi Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan :



Gambar 1 Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan

(Sumber : Yusuf Qardhawi, 2010 dalam Hakim, 2018)

4. Faktor Penentu Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor penentu utama kemiskinan, yaitu karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu. Biasanya setiap daerah mempunyai hubungan yang berbeda antara karakteristik wilayah dengan kemiskinan. Kemiskinan banyak terjadi di daerah yang memiliki letak geografis yang sulit dijangkau, sumber daya yang rendah dan keadaan iklim yang tidak menentu.

Kemudian hubungan karakteristik masyarakat dengan kemiskinan menyangkut tingkat kepercayaan diri dalam masyarakat dimana pentingnya organisasi sosial dan “modal sosial”. Selain untuk menghilangkan kesenjangan sosial juga merupakan upaya efektif untuk mengurangi kemiskinan serta memperluas organisasi sosial masyarakat miskin. Organisasi sosial disini mengacu pada sistem kekeluargaan, jaringan masyarakat miskin dan organisasi lokal serta dapat dianggap sebagai bentuk lain dari modal sosial. Sedangkan hubungan modal sosial dengan pembangunan merupakan keterampilan sosial individu, toleransi antar sesama, menyelesaikan masalah, dan lain-lain.

Ukuran dan struktur rumah tangga merupakan suatu hal yang penting karena merupakan indikator dalam sebuah hubungan yang baik antara kemiskinan dengan struktur rumah tangga (Houghton dan

Khandker, 2012). Perbedaan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat dilihat dari susunan rumah tangga, seperti jumlah anggota rumah dan karakteristik rumah tangga seperti usia.

Faktor penentu kemiskinan yang terakhir bisa dilihat melalui tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, seperti pendidikan terakhir yang dicapai, jarak tempuh dengan sekolah dan fasilitas pendidikan oleh masyarakat miskin dan tidak miskin. Ada dua indikator penting yaitu kemampuan baca tulis dan pendidikan untuk menentukan kualitas hidup dan hak mereka sebagai penentu kemampuan orang miskin agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan.

5. Garis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan atau garis kemiskinan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu untuk mengetahui standar yang menunjukkan bahwa seseorang berada dibatas miskin apabila dilihat dari sisi konsumsi dapat dilihat melalui kebutuhan non-makanan yang mereka konsumsi. Tidak ada garis kemiskinan yang umum digunakan, karena setiap negara memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara lokasi dan standar kebutuhan hidup yang berbeda di setiap negara.

Menurut BPS (2019) garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan

non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai dikeluarkan untuk kebutuhan minimum makanan, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, minyak, susu, kacang-kacangan, sayuran, dan sebagainya. Biasanya pengeluaran makanan sebanyak 2.100 kilokalori perkapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah nilai yang dikeluarkan untuk kebutuhan minimum seperti, rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Rumus penghitungan garis kemiskinan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Teknik penghitungan GKM

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

- b. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disertakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung garis kemiskinan makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{JP} = \sum_{K=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p

P_{jkp} = Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

P = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

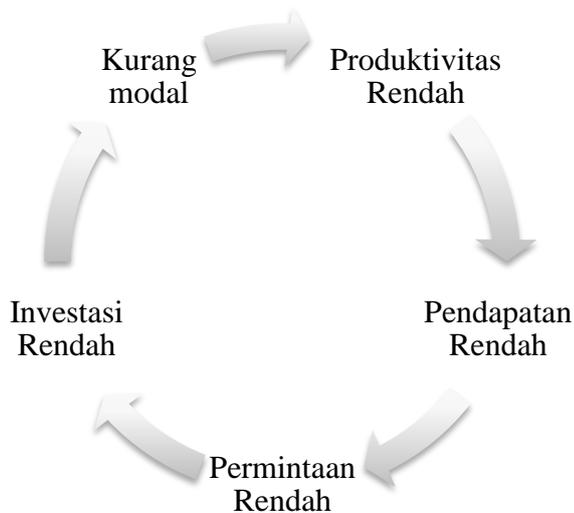
HK_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- c. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah penjumlahan dari nilai kebutuhan minimum dari komoditi non-makanan, seperti rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/ sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

6. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan diartikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang akan mempengaruhi satu sama lain sehingga akan menyebabkan suatu keadaan dimana sebuah negara akan berada pada titik kemiskinan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik akan mengalami banyak kesulitan yang harus dihadapi.

Menurut Nurkse dalam Agustina dkk (2018: 269) mengungkapkan bahwa lingkaran kemiskinan merupakan suatu rangkaian yang mempengaruhi satu sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga akan mengakibatkan keadaan suatu negara mengalami kemiskinan serta menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan produktivitas menurun sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian rendahnya investasi tersebut akan menyebabkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Menurut Nurkse Ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, sehingga mengurangi modal dan tingkat produktivitas rendah dan seterusnya. Dari sisi permintaan (*demand*), pada negara-negara miskin biasanya kemampuan dalam menanam modal sangat rendah. Rendahnya kemampuan dalam menanam modal disebabkan karena terbatasnya luas pasar yang digunakan untuk berbagai macam jenis barang. Hal ini terjadi karena pendapatan masyarakat yang juga sangat rendah. Pendapatan masyarakat rendah terjadi karena produktivitas yang dimiliki masyarakat rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Kurangnya dorongan untuk menanamkan modal menyebabkan pembentukan modal menjadi terbatas. (Nurkse dalam Didu dan Fauzi, 2016).

B. Jumlah Penduduk

Secara umum, negara berkembang memiliki peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Peningkatan jumlah penduduk ini bukan hanya masalah jumlah tetapi menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai jumlah penduduk dan pembangunan suatu negara. Pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah penduduk dapat menjadi penghambat suatu negara dalam melakukan pembangunan, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa jumlah penduduk dapat dianggap sebagai pemacu pembangunan suatu negara.

Alasan mengapa bahwa jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai penghambat pembangunan karena apabila jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk suatu daerah tinggi, dianggap hanya akan menjadi beban pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan pendapatan perkapita menjadi rendah dan akan menyebabkan masalah ketenagakerjaan. Penduduk merupakan pemacu pembangunan karena populasi penduduk yang besar sebenarnya adalah pasar potensial untuk meningkatkan produksi berbagai macam barang dan jasa sehingga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang menguntungkan semua pihak yang kemudian biaya produksi akan turun dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran akan tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan

merangsang output atau produksi agregat lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akan menurunkan tingkat kemiskinan (Suprianto dkk, 2017).

Jumlah penduduk adalah semua orang yang menetap di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang menetap kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2019). Jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi permintaan merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, dengan kata lain merupakan faktor pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi penawaran merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang diperlukan dan banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun disuatu wilayah (Robinson dalam Didu dan Fauzi, 2016).

Selain akan berdampak buruk terhadap persediaan bahan pangan, laju pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan masalah lain pada pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Alasan pertumbuhan penduduk dikatakan sebagai penghambat pembangunan dibagi menjadi tiga (Meier dalam Didu dan Fauzi, 2016), yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan konsumsi semakin meningkat. Rendahnya sumberdaya perkapita akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk lebih cepat dan mengakibatkan investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.

2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengancam ketidakseimbangannya antara sumber daya alam yang langka karena banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Salah satu penyebab ketergantungan tersebut adalah karena pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan perpindahan penduduk dari bidang pertanian tradisional ke bidang pertanian modern atau pekerjaan modern lainnya menjadi lambat.
3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tinggi tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada negara sedang berkembang pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang menurun dan akan mengakibatkan penambahan penduduk miskin. Karena pada negara sedang berkembang pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi penghambat negara tersebut dalam melakukan pembangunan ekonomi (Nelson dan Leibstein dalam Agustina dkk, 2018).

Teori siklus populasi kemiskinan adalah pendapat utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan berbagai macam konsekuensi ekonomi yang merugikan. Salah satunya adalah kemiskinan yang bersifat kronis yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu daerah, sementara faktor

produksi yang dihasilkan jumlahnya tetap maka persediaan hanya akan meningkat menurut deret hitung, karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) akan terus mengalami penurunan sampai serendah mungkin sehingga masyarakat harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten menurut teori Malthus (Malthus dalam Agustina dkk, 2018).

Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Hubungan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan ini dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada kualitas pertumbuhan penduduk itu sendiri. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi positif jika pertumbuhan penduduk tersebut dapat menambah tenaga kerja yang akan meningkatkan sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang bersifat negatif dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menyebabkan kebutuhan konsumsi hasil-hasil produksi menurun. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang baik adalah jika pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi (Agustina dkk, 2018)

Ada beberapa konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yaitu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan

pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat diartikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud (Todaro dan Smith (2006) dalam Supriyanto dkk, 2017).

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari semua produk yang telah dihasilkan dari suatu daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa tersebut diukur dengan uang atas harga pasar yang sedang berjalan. Sehingga pada umumnya perhitungan pendapatan regional berdasarkan pada harga berlaku, inflasi sehingga tidak selalu pendapatan yang diterima adalah kenaikan riil. Karena itu, perhitungan pendapatan juga didasarkan pada harga konstan (harga tahun dasar) untuk melihat kenaikan atau penurunan secara riil dari kenaikan atau penurunan perekonomian suatu daerah (Alhudori, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi dasar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Apabila laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat maka distribusi pendapatan untuk rumah tangga faktor produksi akan membaik. Karena salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan faktor produksi adalah pertumbuhan ekonomi. Karena jika pertumbuhan ekonomi semakin membaik otomatis produktivitas faktor produksi juga akan meningkat dan upah yang diterima para pekerja juga akan tinggi. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang (Ramdani, 2015).

Menurut (BPS, 2019) nilai PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB merupakan total nilai tambah atas unit produksi yang berupa barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan komodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa lainnya

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah imbalan dari faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi suatu wilayah pada waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Maksud dari imbalan tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang belum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya). Dalam hal ini berarti PDRB termasuk di dalamnya menyangkut penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung yang dikurangi dengan subsidi.

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. Geluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan inventori, dan
5. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor)

Pada dasarnya nilai yang dihasilkan akan sama dari semua pendekatan tersebut. Jumlah pengeluaran yang dihasilkan harus sama dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi. PDRB ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena termasuk didalamnya mengandung pajak tidak langsung neto.

Keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi yang dilihat dari sisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan nilai PDRB yang meningkat pada daerah tersebut. Namun penungkatan PDRB tersebut tidak menjamin bahwa keseluruhan masyarakatnya sudah merasakan kesejahteraan. PDRB digunakan untuk menggambarkan gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat saja. Selain itu PDRB juga dapat digunakan untuk indikator pembangunan. Pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkat apabila PDRB disuatu daerah juga meningkat, sehingga menciptakan sumber penerimaan daerah tersebut juga meningkat. (Thamrin, 2001 dalam Alhudori, 2017).

D. Angka Harapan Hidup

Terdapat beberapa anggapan ekonomi bahwa kesehatan adalah fenomena ekonomi yang bisa dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga ataupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Untuk mengukur kesehatan individu di suatu wilayah dapat menggunakan Angka Harapan Hidup sebagai indikator. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh seseorang semasa hidupnya. Selain itu, angka harapan hidup juga dapat dikatakan sebagai umur yang mungkin dapat ditempuh oleh seseorang yang lahir pada tahun tertentu (Suprianto dkk, 2017).

Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kesehatan masyarakat disuatu wilayah salah satunya adalah dengan angka harapan hidup diwilayah tersebut. Sehat tidak hanya mencerminkan kondisi bebas dari penyakit dan kesejahteraan fisik saja tetapi juga mencerminkan kondisi dimana mental dan sosial seseorang juga baik. Mereka yang baik dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi (WHO dalam Dores, 2015).

Menurut Sukirno (dalam Dores, 2015) indikator kesehatan yang berkaitan dengan status kesehatan individu atau kelompok disuatu daerah dapat dilihat dari :

- a. Angka kelahiran dan angka kematian
- b. Angka kesakitan
- c. Angka harapan hidup
- d. Angka yang menyangkut proses persalinan

Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki layanan kesehatan untuk penduduk karena kesehatan dapat menyebabkan produktivitas penduduk menjadi meningkat terutama bagi mereka yang bekerja. Karena efisien kerja mereka meningkat akan menyebabkan kemampuan mental dan fisik mereka menjadi lebih baik dan pada akhirnya pendapatan yang akan mereka terima menjadi lebih besar. Hal ini akan sangat berpengaruh

baik pada kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan tercermin pada berkurangnya jumlah penduduk miskin (Dores, 2015).

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak pada kemiskinan. Sehingga apabila suatu negara yang penduduknya sehat maka diyakini bahwa akan mempunyai perekonomian yang “sehat” pula (Mariyanti dan Mahfudz dalam Bintang dan Woyanti, 2018). Menurut Wyk dan Bradshaw (2017) masyarakat yang memiliki angka harapan hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih

tinggi. Sedangkan menurut Ataguba, et al (2013 dalam Bintang dan Woyanti, 2018) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Puspita (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah dengan metode penelitian menggunakan regresi data panel model *Random Effect Generalized Least Square*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, PDRB mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. Alhudori (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh IPM, PDRB, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) pada kabupaten/ kota Jambi tahun 2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, berdasarkan analisis regresi linear berganda PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, berdasarkan analisis regresi linear berganda jumlah

pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Ramdani (2015) melakukan penelitian mengenai Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-1012 dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan, secara parsial pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
4. Bintang dan Woyanti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015) dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
5. Suprianto, Pamungkas dan Zikriana (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan

Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode penelitian asosiatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

F. Model Penelitian

Dibawah ini merupakan gambar yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen Kemiskinan dengan variabel independen Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Permasalahan dasar yang sering terjadi di suatu wilayah atau daerah salah satunya adalah jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk di suatu daerah atau wilayah tidak dapat dikendalikan maka akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun dan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Menurut Nelson dan Leibstein (dalam Didu dan Fauzi, 2016) pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh langsung. Pengaruh langsung yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk adalah apabila pertumbuhan penduduk di suatu daerah tinggi maka kesejahteraan masyarakat tidak akan mengalami

perubahan ke arah yang lebih baik dan dalam jangka panjang masalah ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin akan meningkat.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan disuatu daerah harus diikuti dengan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tinggi dan stabil. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan maka akan menghasilkan ketimpangan pendapatan (*ceteris paribus*), sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003 dalam Dama dkk, 2016). Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diikuti berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke

barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang (Kuncoro dalam Dama dkk, 2016).

3. Hubungan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan

Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat perkembangan kesehatan disuatu wilayah tertentu. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya usia hidup penduduk di suatu wilayah tertentu. Sehat tidak hanya mencerminkan kondisi bebas dari penyakit dan kesejahteraan fisik saja tetapi juga mencerminkan kondisi dimana mental dan sosial seseorang juga baik. Mereka yang baik dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi. Apabila efisien kerja yang dilihat dari kemampuan fisik dan mental seseorang dalam keadaan baik maka hasil yang mereka dapat juga akan lebih besar. Teantunya hal ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan (Dores, 2015).

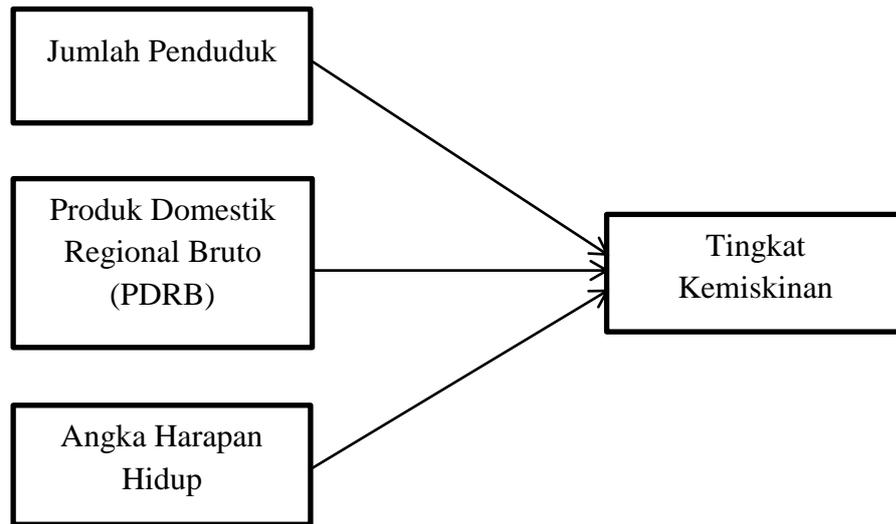
G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

3. Diduga variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

H. Kerangka Berfikir



Gambar 3 Kerangka Berpikir